

Buletin Parlementaria



DPR Perkaya Masukan untuk RUU Kepariwisata



3 Puan Maharani
Dorong Pelajar
Perempuan
Jadi Pemimpin



4 Gobel:
Pembangunan KCJB
Sudah Selesai,
Harusnya Tanggung
Jawab Badan Usaha,
Bukan APBN

Nomor 1265/IV/IX/2023 September 2023



9 772614 339005



DPR Perkaya Masukan untuk RUU Kepariwisata

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan menyambangi Bali untuk menerima masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisata yang kini tengah dibahas di parlemen. Rancangan beleid ini perlu banyak mendapatkan masukan baik dari definisi kepariwisataan, baik SDM dan Pariwisata Digital.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan perlunya aturan yang jelas untuk sektor wisata agar tidak ada lagi privatisasi oleh pihak investor sehingga kepentingan masyarakat tidak terganggu. "Banyak lokasi wisata di Bali ini sudah diprivatisasi oleh investor, seperti contohnya beberapa pantai di Bali masyarakat umum sudah sulit untuk mengaksesnya, ini harus di atur secara jelas dan rinci di RUU Kepariwisata," ungkap Abdul Fikri Faqih saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Klungkung, Bali (27/9).

Lebih lanjut legislator dapil Jateng IX ini mengungkapkan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dalam proses pengurusan sertifikat hak milik (SHM) sebagian meter pantai wisata harus tetap milik umum.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan program wisata Destinasi Super Prioritas (DSP) dari pemerintah dinilai tidak terlalu signifikan karena banyak hal yang belum disesuaikan. Mulai dari sumber daya manusia, atraksi, hingga keberlanjutannya. Karena itu, jelasnya, majalah Forbes pernah



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Klungkung, Bali (27/9/2023).

menempatkan Indonesia sebagai *The Most Beautiful Places in the world*.

Karena itulah, tegasnya, dari awal Komisi X menekankan adanya koordinasi antara Pentahelix dalam pengembangan pariwisata. Mulai dari unsur pemerintah, media, akademisi, pebisnis/praktisi, hingga komunitas. Bali sudah memiliki semua keunikan tersebut sehingga siap sedia untuk melakukan perubahan dalam sektor pariwisata.

"Bali sudah mengarah kepada *quality tourism* yang benar-benar menyoar kepada masyarakat yang memiliki spending besar dan tidak memberikan akses di kemudian hari. Karena itu Panja RUU Pariwisata ini ingin mendalami apa yang dilakukan

pemerintah dan *stakeholder* di Bali," ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Hal senada turut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid, dimana saat pandemi Covid-19, Indonesia kehilangan banyak devisa dari pariwisata khususnya Bali. "Oleh karenanya, setelah pandemi Covid-19 ini, tantangan yang perlu dihadapi mengenai kualitas dari wisatawan, dan untuk menghasilkan wisatawan yang berkualitas perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kepariwisataan melalui amandemen peraturan," sebutnya. [pdt,rdn,we/aha](https://pdt.rdn.we/aha)

Scan QR untuk berita selengkapnya





Puan Maharani Dorong Pelajar Perempuan Jadi Pemimpin

Ketua DPR Puan Maharani mendorong pelajar perempuan untuk berani mengambil peran untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sama dengan pelajar laki-laki, menurutnya, pelajar perempuan juga memiliki kompetensi diri sekaligus potensi yang besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

"Saya bisa berada di sini (menjadi Ketua DPR), jadi ini bukti bahwa perempuan bisa memiliki kesempatan yang sama. Perempuan itu bisa maju. Perempuan berhak memperoleh tempat yang adil sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya," ucap Puan dalam forum 'Indonesia Student Leadership Camp' (ISLC) Universitas Indonesia Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, proporsi perempuan bisa mencapai 32,26 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Dari statistik tersebut, peran perempuan dianggap sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

Mewujudkan kesetaraan gender, imbuhnya, tidak bisa hanya sekadar menunggu tanpa usaha yang keras. Sebab itu, ia berharap para pelajar saling mendukung satu sama lain secara positif. "Untuk meraih cita-cita dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak bisa hanya diam saja. Setiap dari kalian harus belajar sungguh-sungguh dan bekerja keras," tandas Puan.

—ts/aha



Ketua DPR RI
Dr. (H.C) Puan Maharani.

FOTO: FOTORSB/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pembertinaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauziral, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfionco Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Irandi, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Priantoro

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Gobel: Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha, Bukan APBN

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan

(Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Sehingga, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN.

Gobel menekankan hal ini menanggapi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.89/2023 yang mengatur tentang penjaminan kereta cepat. Permenkeu tersebut, menurut Gobel, membuat APBN menjadi tak adil bagi pemajuan kesejahteraan umum, apalagi ada unsur investasi asing.

"APBN menjadi terikat secara permanen dan selamanya terhadap sebuah kegiatan badan usaha. Tentu APBN menjadi tak adil. APBN itu untuk kemaslahatan umum. Ini bisa membuat Presiden Jokowi yang sudah memiliki banyak *legacy* luar biasa dalam memimpin Indonesia, tercederai dan menimbulkan persepsi negatif," ujar Gobel, Jakarta, Jumat (22/9).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan ketika Pemerintah melahirkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021, masih bisa dimengerti karena untuk mewujudkan dan menyelesaikan proyek kereta cepat yang sedang dalam tahap pembangunan.

"Walaupun itu menunjukkan ada sesuatu yang tak beres dalam perencanaan. Akibatnya, Pemerintah melakukan penyertaan modal negara



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

(PMN) untuk KAI sebesar Rp7,5 triliun, yaitu 2021 Rp4,3 triliun dan 2022 Rp3,2 triliun. Dana PMN ke KAI itu sepenuhnya untuk kereta cepat," kata Gobel.

Tapi kini, lanjut Gobel, pembangunan proyek kereta cepat sudah selesai sehingga segala biaya mestinya sepenuhnya berada dalam tanggung jawab badan usaha. "Jangan bawa-bawa APBN lagi, apalagi secara permanen," tandas Gobel. Gobel mengingatkan, apa yang ia sampaikan merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dan sebagai warga negara.

"Bukan tidak setuju terhadap kereta cepat. Dari awal saya sangat mendukung kereta cepat, tapi dukungannya dalam batas kewajaran

dan kepatutan dalam konteks kemaslahatan publik yang luas. Jadi tak perlu berlebihan. Mestinya biarkan itu bersifat *B to B* saja," tegas Gobel.

Sebagaimana diketahui, pada 1 Oktober 2015, Pemerintah mengumumkan bahwa China memenangi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. China menang terhadap Jepang karena empat hal. Pertama, tidak menggunakan dana APBN. Kedua, skema kerja sama *business to business*. Ketiga, tidak meminta penjaminan dari pemerintah. Keempat, biaya lebih murah, yaitu US\$5,595 miliar dibandingkan usulan Jepang US\$6,223 miliar.

 pun/aha



Sugiono Harap TVRI Jateng Jadi Corong Promosi Pemilu



FOTO: HNM/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sugiono saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI dengan LPP TVRI Jawa Tengah di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat, (22/09/2023).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sugiono berharap Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Jawa Tengah (Jateng) dapat menjadi corong bagi promosi pemilu yang jujur, bersih, damai, serta mampu menjadi media yang menyejukkan bagi seluruh stakeholder didalamnya.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI dengan LPP TVRI Jawa Tengah di

Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat, (22/9). "Karena itu, melalui Kunspek Komisi I DPR RI ke LPP TVRI Jawa Tengah ini dalam rangka melakukan pengawasan dalam pemberitaan mengenai pemilu 2024," jelas Sugiono.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang LPP, maka isi siaran LPP TVRI, wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Karena itu, legislator tersebut mengatakan Tim Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi I DPR mendorong LPP TVRI Jawa Tengah untuk terus meningkatkan kinerja sesuai tugas dan perannya termasuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024.

Namun, disamping itu LPP TVRI Jateng menyampaikan di dalam paparannya akan kendala yang dihadapi terkait penyebaran informasi Pemilu 2024. Seperti halnya, keberhasilan program pemilu yang TVRI Jateng sajikan itu tergantung dari anggaran yang dimiliki.

Mendengar hal tersebut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun mengatakan, "Tim Kunspek Komisi I DPR RI akan menggunakan informasi tersebut sebagai rujukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan LPP TVRI," katanya.

Untuk diketahui, dalam pemilu 2024, LPP TVRI memiliki peran dan tanggung jawab yang strategis untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu melalui siaran berita dan non berita dengan konten yang mampu meningkatkan partisipasi pemilih, memberikan informasi yang benar dan jelas, mendidik dan mencerdaskan, sehingga pemilih memiliki pola pemikiran yang kritis, analitis, dan komprehensif.

"Pemberian informasi tersebut memiliki nilai penting yang berkorelasi positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Karena itu, TVRI harus mampu berperan strategis sebagai media utama dalam menyampaikan informasi pesta demokrasi secara komprehensif," jelas Sugiono.

hnm/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi I Dukung Tambahan Personel dan Anggaran TNI Amankan Pemilu 2024

Pemilu 2024 tak terasa tinggal lima bulan lagi. Berbagai tahap demi tahap Pemilu telah dan sedang dilaksanakan.

Mengingat Pemilu adalah agenda strategis nasional serta sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka sudah tentu menjadi tugas aparat keamanan mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam konteks ini, peran TNI sesuai dengan tugas dan fungsi perbantuan TNI kepada Polri bidang Kamtibmas amat strategis dalam pengamanan Pemilu. Salah satunya yaitu Korem 064/ Maulana Yusuf di Serang, Banten. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendukung penuh usulan kekuatan personel militer, yang sampai saat ini baru mencapai 69 persen.

"Komisi I DPR RI mencatat usulan kebutuhan yang telah disampaikan Korem 064/ Maulana Yusuf, antara lain untuk dukungan kekuatan personel militer yang baru mencapai 69 persen dan belum adanya anggaran untuk pengamanan Pemilu 2024," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 064/ Maulana Yusuf, Serang, Banten, Jumat (15/9).

Tak hanya itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan Komisi I DPR RI juga sepakat mendukung usulan bahwa TNI diberi tugas dan tanggung jawab yang sama dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 khususnya di TPS dalam rangka menciptakan pelaksanaan Pemilu



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat foto bersama usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 064/ Maulana Yusuf, Serang, Banten, Jumat (15/9/2023).

yang aman dan damai khususnya di wilayah tugas Korem 064/ Maulana Yusuf.

"Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan usulan kebutuhan tersebut sebagai bahan masukan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Darat," pungkas Utut menutup kesimpulan rapat.

Sebelumnya, Komisi I DPR dalam rapat itu telah mendengarkan paparan Danrem 064/ Maulana Yusuf mengenai perkembangan situasi dan hal-hal menonjol, serta kerawanan dan ancaman baik militer maupun non

militer yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI pun mengapresiasi langkah proaktif Korem 064/ Maulana Yusuf.

Turut hadir Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan, Irmadi Lubis (Fraksi PDI-P), Fadhlullah (Fraksi Gerindra), Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Fraksi Demokrat), Hasbi Anshory dan Kresna Dewanata Phrosakh (Fraksi Nasdem). Hadir pula Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Brigjen TNI M. Jangkung Widyanto dan Komandan Korem (Danrem) 064/ Maulana Yusuf Brigjen TNI Tatang Subarna dan segenap jajaran Dandim di Provinsi Banten. **pun/rdn**



Komisi II Setujui Dua Rancangan Perbawaslu dan DKPP

Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyetujui dua rancangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan dua rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Tadi kita Alhamdulillah sudah menyetujui dua Peraturan DKPP dan dua Peraturan Bawaslu," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat konsultasi Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Pertama, rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum. Dan yang kedua yakni, rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Sementara itu, dua rancangan DKPP yang disetujui adalah rancangan Peraturan DKPP tentang

**”
TUJUH
PERATURAN
ITU, TIGA DARI
RANCANGAN
PERATURAN KPU,
DUA RANCANGAN
PERATURAN
BAWASLU, DAN
KEMUDIAN DUA
RANCANGAN
PERATURAN DKPP**



FOTO: ARIF/PDT

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat diwawancarai usai rapat konsultasi Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Naskah Dinas, serta rancangan Peraturan DKPP tentang Tenaga Ahli. "Kita sahkan peraturan DKPP ya," kata Doli saat memimpin jalannya rapat.

Doli menjelaskan bahwa dalam rapat konsultasi tersebut pihaknya bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI membahas tujuh rancangan peraturan lembaga penyelenggara pemilu. "Tujuh peraturan itu, tiga dari rancangan Peraturan KPU, dua rancangan Peraturan Bawaslu, dan kemudian dua rancangan peraturan DKPP," kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Adapun tiga rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang dibahas dalam rapat konsultasi tersebut adalah rancangan PKPU tentang Perubahan PKPU mengenai Kampanye, rancangan PKPU

tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Dia menyebut rapat konsultasi tersebut digelar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setiap KPU, Bawaslu, dan DKPP sebelum menerbitkan peraturan, mereka harus berkonsultasi dulu dengan DPR dan Pemerintah. "Nah, hari ini kami terima surat dari tiga-tiganya dan kita laksanakan sore hari ini," pungkas Doli.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi III Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Secara Profesional

Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap tujuh calon hakim MK. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menjelaskan, uji kelayakan dan kepatutan akan menjaring calon hakim MK dari berbagai latar belakang berdasarkan aspek kepatutan. Dia pun mengungkapkan bahwa uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim MK dilangsungkan secara terbuka untuk umum.

Para calon hakim tersebut antara lain, Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriadi Azhari, dan Abdul Latif, Haridi Hasan dan Arsul Sani. "Kan ini *fit and proper test* terbuka," kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, di Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Uji kelayakan dan kepatutan

”

FIT AND PROPER ITU ARTINYA FIT ITU PAS, PROPER PATUT. PATUT APA ENGGAK PASTI PUNYA UKURAN. HARI INI YANG SUSAH ADALAH MEMBUAT KEPATUTAN, ITU PATUT APA ENGGAK TADI. NAH, FIT ITU MAMPU ENGGAK IKI, UDAH FIT BELUM DENGAN JABATANNYA KAN BEGITU LOH.

terhadap calon hakim MK berlangsung pada Senin-Selasa (25-26 September 2023). Pada hari terakhir, rencananya Komisi III DPR akan mengambil keputusan dan penetapan calon hakim konstitusi dari unsur DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjadi salah satu calon hakim MK. Bambang Pacul Menegaskan uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III dijalankan secara profesional.

"*Fit and proper* itu artinya *fit* itu pas, *proper* patut. Patut apa enggak pasti punya ukuran. Hari ini yang susah adalah membuat kepatutan, itu patut apa enggak tadi. Nah, *fit* itu mampu enggak iki, udah *fit* belum dengan jabatannya kan begitu loh. Jadi, kau jangan menanyakan asal latar belakang dari mana," papar Bambang Pacul.

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menggantikan posisi Wahiduddin

Adams. "Dengan telah berakhirnya uji kelayakan terhadap saudara Prof. Abdul Latif maka berakhir pula acara uji kelayakan pada hari ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menutup jalannya uji kelayakan dan kepatutan pada hari pertama di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Sementara dua calon hakim MK lainnya, yakni Haridi Hasan dan Arsul Sani akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar pada Selasa (26/9) siang. "Dan uji kelayakan akan dilanjutkan besok pada pukul 14.00 (WIB)," ujarnya. — **ssb/aha**



FOTO: GER/PDT

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto di Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023).



Komisi IV Dorong Pembinaan Infrastruktur Balai Besar Perikanan Air Sukabumi

Komisi IV DPR RI mendorong adanya pembinaan terhadap kondisi balai besar perikanan air tawar yang berada di Sukabumi. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan, usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (15/9).

Menurutnya, kondisi infrastruktur yang ada di balai besar perikanan air tawar Sukabumi sudah hampir berusia hampir satu abad yaitu sejak tahun 1914. "Tentunya beberapa fasilitas infrastruktur perlu ada perbaikan termasuk sarana prasarana teknologi kita akan mendukung untuk adanya pembinaan, ini penting mengingat bahwa UPT ini bisa menjembatani beberapa persoalan strategis terutama khusus pangan karena ikan menjadi alternatif pangan murah termasuk juga mengentaskan masalah stunting," kata Budhy Setiawan.

Ia menjelaskan dilihat dari potensinya sektor perikanan khususnya perikanan budidaya mampu dijadikan salah satu penopang ketahanan pangan karena ikan merupakan bagian penting dari bahan pangan masyarakat Indonesia yang menyumbang lima puluh persen dari seluruh asupan protein hewani dan berperan sebagai



FOTO: AFR/PDT

Wakil ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan saat meninjau balai besar perikanan air tawar dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (15/9/2023).

sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi bawah.

"Ikan mampu menjadi solusi karena nilai protein nilainya yang murah ini juga menjadi alternatif untuk kita untuk mengatasi persoalan krisis pangan dan solusi atas permasalahan gizi buruk dan gizi berlebih yang menyebabkan stunting," jelasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini juga menerangkan, budidaya ikan air tawar juga memiliki potensi ekspor yang

sangat tinggi khususnya ikan tilapia dan Oktober mendatang pembangunan balai khusus untuk pembudidayaan ikan tilapia di Karawang juga sudah mulai beroperasi, kita bisa melihat hasil dari tilapia yang berukuran besar.

"Kita memiliki keunggulan Program dari kementerian kelautan dan perikanan, yaitu ikan tilapia akan kita genjot dan ikan akan kita ekspor pangsa pasarnya adalah Amerika Eropa dan itu kita bisa menembus lebih dari 16 negara ekspor," pungkasnya. afr/aha



Pemerintah Harus Gencar Sosialisasikan PSR



Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat memimpin Tim Komisi IV DPR yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah mengencarkan sosialisasi program Peremajaan Sawit

Rakyat (PSR). Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, usai memimpin Tim Komisi IV DPR yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk mengikuti Program PSR ini.

Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektar PSR baru di tahun 2023 dari yang ditargetkan seluas 180.000 hektar. Sudin menyangkan hal tersebut, mengingat program ini dicanangkan untuk memberi kemudahan bagi

masyarakat bertani sawit. "Makanya tadi saya bilang target di Sumatera kok 500 (hektar) tapi hasilnya nol. Jadi, jangan buat target tinggi-tinggi tapi hasilnya nol. Yang saya inginkan adalah targetnya kecil, tapi produktivitasnya bertambah," ujar Sudin kepada **Parlementaria** usai kunjungan, Jumat (15/9).

Lewat kunspek tersebut ditemukan berbagai alasan masyarakat enggan mengikuti PSR. Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang rumit, isu-isu miring akan dijualnya tanah petani jika mendaftarkan tanahnya untuk program PSR, hingga kurangnya pemahaman masyarakat akan keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut.

Sudin kemudian mendorong pemerintah melalui Kementerian

Pertanian mengencarkan sosialisasi ke masyarakat. Beberapa alasan yang dilontarkan petani di Kunspik Komisi IV itu, kata Sudin, perlu diluruskan. Masyarakat pun, kata dia, perlu tahu keuntungan dari program PSR. Karena pada dasarnya, menurut Sudin, PSR hadir untuk memberi kesempatan bagi petani kecil untuk bisa memperoleh keuntungan dari bertani sawit.

"Yang pertama sosialisasi, yang kedua kurang memberi pengertian ke masyarakat, yang ketiga harusnya Dinas Perkebunannya harusnya lebih aktif lagi. Kalau dulu itu untuk mendapatkan psr itu ada 21 persyaratan, sekarang sudah cukup mudah," kata dia.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot S. Hidayat meminta pemerintah proaktif memberi penjelasan soal PSR ke masyarakat. Terlebih lagi kata dia, anggaran untuk program PSR ini begitu berlimpah. "Saya minta Kementerian Pertanian, BPDPKS serta asosiasi itu proaktif untuk turun. Dananya ada kok, anggarannya ada kok. Sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi sawit rakyat," ucap dia.

Djarot pun menjelaskan beberapa keuntungan masyarakat bila mengikuti PSR. Masyarakat kata dia, bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit, mengingat harga komoditas itu di pasaran cukup tinggi. "Masyarakat itu punya kewenangan dan kesempatan untuk mendapatkan kebun sawit. Supaya untuk sawit tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sawit itu juga bisa dinikmati oleh rakyat," pungkasnya. **ndn/rdn**



Penataan Kawasan **Wisata Dieng** Dorong **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**



FOTO: SKR/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Wisata Dieng di Jawa Tengah, Jumat (15/09/2023).

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng mendapat alokasi anggaran sebesar Rp82,2 Miliar untuk penataan Kawasan Wisata Dieng yang akan dimulai pada tahun 2023 dan akan selesai pada tahun 2024. Penataan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Wisata Dieng ini diharapkan mampu mengubah wajah Kawasan Wisata Dieng yang baru tanpa menghilangkan nilai artistik dan potensi alam yang ada, agar lebih menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Hal itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin

kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Wisata Dieng. Ia menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI ingin melihat secara langsung sudah sejauh mana proses penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng, sekaligus menyerap aspirasi maupun masukan-masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

"Kehadiran Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja pada hari ini ingin mengetahui secara langsung dan menggali informasi sudah sejauh mana Penataan KSPN Dieng akan dilaksanakan. Kami berharap dengan adanya penataan kawasan wisata ini, akan mendorong pertumbuhan

ekonomi di dua Kabupaten di Provinsi Jateng," ungkap Andi Iwan Darmawan Aras kepada **Parlementaria**, di Dieng, Jawa Tengah Jumat (15/9).

"Penataan Kawasan Dieng diharapkan mampu menghadirkan para wisatawan yang lebih banyak lagi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo," ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Cakra Negara mengatakan, penataan Kawasan Wisata Dieng sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 Tahun 2011 terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas).

"Kawasan Wisata Dieng ini merupakan bagian terintegrasi dari pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan sekitarnya (Destinasi Super Pariwisata Nasional (DSPN) untuk mendukung pembangunan kepariwisataan wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Nasional," kata Cakra Negara.

Sementara Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto menyampaikan ucapan terima kasih, karena pada tahun 2023 ini Dieng mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat untuk penataan infrastruktur kawasan wisata Dieng. "Kawasan wisata Dieng memang belum bisa menyaingi Borobudur, tapi akan berusaha mengejar menjadi tujuan wisata favorit di Jawa Tengah," ujarnya. **skr/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perdagangan Digital Diharapkan Tidak Matikan Perdagangan Tradisional

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal berharap adanya perdagangan digital (*e-commerce*) melalui berbagai *platform* digital tidak lantas mematikan perdagangan secara tradisional yang ada di pasar-pasar di masyarakat. Menurutnya, pengusaha memang harus bisa beradaptasi secepat mungkin dengan hadirnya *platform* perdagangan digital.

Namun, hadirnya perdagangan digital, lanjut Hekal, seyogyanya menjadi penambah sarana marketing bagi pengusaha. "Kita enggak bisa sepenuhnya terus pindah meninggalkan interaksi fisik ya, dan kita juga berharap bahwa tempat perdagangan media sosial itu bukan menghabiskan tempat-tempat



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

”

KITA HARUS MEMBERIKAN SUPPORT YANG SEBISA MUNGKIN DAN MENJAGA SUPAYA PERDAGANGAN INI TETAP MERIAH LAH DI SEMUA TEMPAT BAIK YANG ONLINE MAUPUN DI TEMPAT-TEMPAT FISIK.

yang tradisional tapi malah menjadi penambah sarana marketing buat orang-orang yang juga berdagang secara tradisional," ujarnya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai, dukungan pemerintah kepada pengusaha utamanya pengusaha dari lapisan bawah yang masih belum mengenal teknologi, sangat dibutuhkan untuk terus menjaga iklim perdagangan yang ada tetap berjalan dengan baik.

"Jadi memang pengusaha-pengusaha kita apalagi yang dari masyarakat lapisan bawah kan

banyak juga yang masih belum mengenal sepenuhnya dengan teknologi perkembangan digital dan seterusnya. Kita harus memberikan *support* yang sebisa mungkin dan menjaga supaya perdagangan ini tetap meriah lah di semua tempat baik yang *online* maupun di tempat-tempat fisik," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya desakan untuk menutup *Tiktok Shop* sebagai *social-commerce* datang dari pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang yang menganggap keberadaan *Tiktok Shop* telah menggerus bisnis mereka di pasar fisik. **bia/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pertamina Diminta Lengkapi Payung Hukum BBM Bersubsidi

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta PT Pertamina Patra Niaga melengkapi payung hukum yang kuat, dimana hari ini regulasi tentang pengaturan BBM bersubsidi ini masih belum selesai di internal Pemerintah. Agenda ini dilaksanakan guna memperoleh perspektif korporasi mengenai dampak subsidi yang terus meningkat akibat dari pada kurang tepatnya penyaluran dari BBM.

Menjalankan fungsi pengawasan untuk mitra Komisi VII DPR RI di antaranya Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ingin memastikan distribusi LPG 3 Kg dan BBM untuk Aviasi penerbangan yang sangat krusial bagi kebutuhan pariwisata di Provinsi Bali, Kamis (21/9).

"Penyaluran yang lebih tepat sasaran dalam langkah-langkah ini kan merupakan sebuah ikhtiar yang dilakukan dan kita apresiasi dan kita dukung, meskipun payung hukumnya belum kuat, harusnya Perpresnya harus segera selesai sehingga Pertamina punya dasar yang kuat dalam rangka melakukan penertiban,"

”

**DENGAN BAIKNYA
JIKA ADA DASAR
HUKUM YANG
KUAT TERKAIT
DENGAN MASALAH
PENYALAHGUNAAN DI
DAERAH LAIN,**

tegasnya kepada **Parlementaria** di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII.

Seperti yang diketahui bahwa Bandara Ngurah Rai di Bali merupakan salah satu bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia, dengan kebutuhan Avtur rata-rata 2.500 mililiter/hari. Hal tersebut mendorong Pertamina untuk menjamin pasokan Avtur dari TBBM Manggis dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ngurah Rai, dengan memperkuat pola pasokan, digitalisasi DPPU serta menambah kapasitas penyimpanan Avtur di TBBM Manggis hingga menjadi 35.000-40.000 KL.

Dengan kapasitas tersebut diharapkan *coverage days* mencapai

23 hari dan dikategorikan aman untuk pasokan Avtur tersebut. Sebab itu, Mukhtarudin berupaya ketersediaan BBM khususnya BBM bersubsidi juga merupakan hal yang sangat penting untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengawasan distribusi BBM tepat sasaran juga perlu ditingkatkan demi menjamin penyaluran kepada masyarakat.

"Dengan baiknya jika ada dasar hukum yang kuat terkait dengan masalah penyalahgunaan di daerah lain, ya ini yang harus jadi waspada atau pemerintah terutama BPH Migas sebagai yang ditugaskan untuk mengawasi hilirnya dengan mengawasi secara ketat," tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

— **upi/aha**



FOTO:ULF/PDT

Anggota Komisi VII DPR, Mukhtarudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Provinsi Bali, Kamis (21/9/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Legislator Minta Hak Cuti di RUU KIA Terhubung dengan UU Ketenagakerjaan yang Berlaku

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mengatakan, hak cuti melahirkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) harus sama dan terhubung dengan UU Ketenagakerjaan yang telah berlaku.

"Hak cuti di RUU KIA ini juga harus sama dengan UU lain contohnya Ketenagakerjaan agar nantinya tidak terjadi ketimpangan dan kebingungan

masyarakat," pungkas John saat Rapat Panja RUU KIA dengan Pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/9).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan dalam RUU KIA hak cuti melahirkan minimal 6 bulan. Selain itu, juga memberikan hak istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter. Sementara itu UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga mengatur hak cuti

melahirkan hanya berdurasi sebatas 3 bulan.

"Jadi masalahnya disitu ya ada perbedaan, di Panja kami berupaya memperbaiki agar jangan sampai ada perbedaan jika bisa itu RUU KIA harus saling terhubung," sebut John.

Ia menambahkan, RUU KIA dirancang untuk menciptakan SDM yang unggul. Sehingga ibu wajib mendapatkan waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibubyang bekerja. ➡ **tn/aha**



FOTO:RSB/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis saat mengikuti Rapat Panja RUU KIA dengan Pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Komisi IX Sampaikan Komitmen Indonesia Akhiri TBC di 2030 di Forum PBB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mengakhiri tuberkulosis (TBC). Hal itu disampaikannya saat berbicara mengenai eliminasi penyakit pernapasan tersebut dalam Pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 'High Level Meeting on Fights against Tuberculosis' (HLMTB) di New York, Jumat (22/9) lalu.

Pertemuan HLMTB di PBB itu adalah proses yang berlangsung setiap lima tahun untuk memantau pencapaian target global dalam upaya eliminasi tuberkulosis di tingkat global dan nasional. UN HLMTB pada tahun ini juga akan menghasilkan 'Political Declaration HLMTB 2023' sebagai hasil dan komitmen dalam lima tahun mendatang.

"Dalam forum ini kami menyampaikan bahwa negara Indonesia berkomitmen kuat dalam mengeliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, mengingat saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua dunia dalam hal kasus penyakit tuberkulosis setelah India. Untuk mempercepat tujuan ini, Indonesia telah merevisi Strategi Nasional TBC untuk 2020-2024 dan rencana interim untuk 2025-2026," ungkap Melkiades yang menjadi salah satu anggota Delegasi RI saat berbicara di forum tersebut dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Senin (25/9).

Lebih lanjut, Melkiades sampaikan tegaskan bahwa kolaborasi dan sinergitas sangat diperlukan untuk upaya eliminasi TB. "Peran antara pemerintah pusat dan daerah yang sudah dituangkan di dalam beberapa regulasi harus diimplementasikan dan dikoordinasikan secara efisien. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan juga sangat krusial," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

"Kami juga berkomitmen untuk mendukung penuh pendanaan program TB dan penyesuaian kebijakan terutama untuk mendesentralisasi layanan sampai ke tingkat faskes primer, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi pasien TBC," imbuhnya.

Melkiades tekankan bahwa berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan sangat esensial untuk memajukan upaya diagnostik, obat, dan vaksin TB. "Semua inisiatif ini tentu memerlukan mekanisme pembiayaan inovatif untuk memastikan keberlanjutan program TB di Indonesia," ujarnya.

Mengutip dari keterangan Menteri Kesehatan RI bahwa keseriusan Indonesia untuk akhiri TBC dapat dilakukan mulai dari menciptakan gerakan di level akar rumput hingga kerja sama di level internasional. Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pengendalian TBC pada tahun 2021, yang merupakan komitmen politik tertinggi untuk mengakhiri TBC. Dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar 15 kementerian yang berbeda.

ann/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat berbicara mengenai eliminasi penyakit pernapasan tersebut dalam Pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 'High Level Meeting on Fights against Tuberculosis' (HLMTB) di New York, Jumat (22/9/2023) lalu.

FOTOGRAF/PDI

Kehadiran Negara bagi WNI Korban TPPO Dipertanyakan

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Non Prosedural yang kerap kali menjadi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Felly menyampaikan, tak sedikit temuan kasus warga Sulawesi Utara ditemukan tak bernyawa dan diduga menjadi korban TPPO. Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan agar WNI tidak menjadi korban TPPO.

"Untuk pekerja (migran) yang tidak resmi, yang pulang dalam keadaan mayat banyak itu bu di

Sulawesi Utara. Nah hal seperti itu, masa terkesan dibiarkan begitu bu. Sebab, lagi-lagi ada korban. Seperti apa langkah pemerintah?" ucap Politisi Dapil Sulawesi Utara ini.

Lebih lanjut, Felly menilai banyak WNI yang menjadi korban TPPO, sebab kurangnya sosialisasi serta edukasi terkait tata cara bekerja di luar negeri. Ia mengatakan, awalnya para korban diimingi pekerjaan dengan gaji tinggi. Namun, setibanya di negara tujuan, mereka justru dipekerjakan sebagai *online scammer*. Para korban kemudian meminta untuk kembali ke tanah air. Namun perusahaan yang merekrut mereka tidak memberikan izin.

"Jadi seperti apa ini penanganan untuk mereka? Mereka juga mengadu nasib sebab boleh dibilang di negara sendiri mereka tidak mendapatkan tempat. Kemudian, ada penawaran dari agen-agen yang tidak resmi, akhirnya mereka berangkat, tetapi pulang-pulang bu tidak bernyawa," ujar Felly.

Karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini mendorong adanya kolaborasi antara kementerian maupun dan lembaga dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dirinya juga berharap ada keseriusan pemerintah untuk memberantas mafia perdagangan orang.

—ann,arn/aha

”

JADI SEPERTI APA INI PENANGANAN UNTUK MEREKA? MEREKA JUGA MENGADU NASIB SEBAB BOLEH DIBILANG DI NEGARA SENDIRI MEREKA TIDAK MENDAPATKAN TEMPAT. KEMUDIAN, ADA PENAWARAN DARI AGEN-AGEN YANG TIDAK RESMI, AKHIRNYA MEREKA BERANGKAT.

FOTO: MGN/PDT



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dede Yusuf Sambut Baik Banyaknya Pegiat Literasi Demi Kemajuan Masyarakat Garut

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyambut

baik dan mendukung penuh upaya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan literasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut. Hal ini diiringi dengan banyaknya pegiat literasi yang tumbuh dan berkembang untuk memajukan di daerah tersebut.

"Hari ini saya cukup kaget, karena disambut begitu banyak pegiat literasi di Garut. Yang kita ketahui, 80 persen wilayah Garut ialah hutan, namun kehidupan berliterasinya tidak pernah berhenti dan terus bergerak maju. Hal ini bisa kita jadikan contoh teladan, sebagaimana Garut ini diusulkan ingin dijadikan Kabupaten Literasi, saya pikir perlu kita *support*," tuturnya di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X di Gedung Pendopo, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (22/9).

Dede menyebut, perpustakaan dapat menjadi wadah untuk melahirkan peningkatan literasi yang kuat. Ia juga mendengar masukan dari beberapa pegiat untuk diberikan fasilitas dan program kegiatan baik secara fisik maupun non fisik.

"Kita terus mengupayakan dan mendukung agar perpustakaan dapat terfasilitasi dengan baik. Secara fisik, diperlukan peningkatan fasilitas perpustakaan

yang ideal. Sehingga tercipta kondisi ruang perpustakaan yang nyaman dan kondusif. Kedua, secara non fisik, akses informasi dan bahan bacaan perlu ditambah. Pergeseran teknologi menuju era digital, mengharuskan masyarakat beralih dan belajar," tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Komisi X telah membentuk Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) yang telah bekerja cukup lama, yaitu 6 bulan. Karena itu, ia bersama Komisi X DPR RI terus menggali masukan-masukan dari daerah, karena ususnya berasal dari daerah.

"Kemudian kalau nanti ditanya seperti apa tindaklajutnya, tentu dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait literasi, harus sesuai dengan apa yang diharapkan UNESCO. Bahwa literasi ini menjadi penting, dilihat dari

kebutuhan literasi masyarakatnya, sekolah maupun literasi yang sifatnya adalah literasi jurnal pendidikan," tutupnya. — **dip/rdn**



FOTO: DIP/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X di Gedung Pendopo, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (22/09/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi X Dorong Peningkatan Kualitas Pustakawan Daerah

Komisi X DPR RI mendorong peningkatan kualitas pustakawan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan ke Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

"Darurat literasi tidak bisa dipisahkan dari tenaga pustakawan yang seadanya," ujarnya kepada **Parlementaria** usai agenda kunspek tersebut, Jumat (22/9). Menurut Fikri, pustakawan yang berkualitas akan meningkatkan indeks literasi di suatu daerah. Ia pun menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal masih banyak pustakawan di tempat itu yang berpendidikan rendah.

”

MASIH ADA YANG MENINGINKAN SUPAYA ADA BANTUAN-BANTUAN BERUPA FISIK, MAUPUN BERUPA BUKU-BUKU, JUGA PELATIHAN-PELATIHAN. TADI KEBETULAN ADA PERWAKILAN BADAN BAHASA KEMENDIKBUD, KEBETULAN JUGA ADA DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL.



FOTO: NDN/RDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin Kunspek Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan ke Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/09/2023).

"Jadi ada (pustakawan) lulusan SMP, ada lulusan SMA. Sangat kecil, se-kabupaten Tegal itu pustakawan yang lulus S-1 itu hanya satu (orang) kalau tidak salah. Ini kan menyedihkan. Itu yang dikeluhkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tegal," ucap Politisi Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Fikri mendorong peran serta pemerintah pusat untuk memperhatikan kualitas para pustakawan di Kabupaten Tegal. Ia pun berkata bahwa temuan dalam kunspek kali ini akan dikomunikasikan dengan para Anggota Komisi X DPR RI lainnya untuk ditindaklanjuti.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat meminta pemerintah membantu pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada di Kabupaten Tegal. Secara konkret, pemerintah kata dia, bisa memberi bantuan dalam bentuk fisik, buku, hingga pelatihan.

"Masih ada yang menginginkan supaya ada bantuan-bantuan berupa fisik, maupun berupa buku-buku, juga pelatihan-pelatihan. Tadi kebetulan ada perwakilan Badan Bahasa Kemendikbud, kebetulan juga ada dari Perpustakaan Nasional. Saya harap bisa direalisasi apa yang diminta," ujarnya **ndn/rdn**



Marinus Gea Dukung Pembukaan Lahan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Banten

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengatakan siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat Banten yang ingin membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit, seiring tren positif industri sawit. Ia juga menyinggung adanya potensi lapangan kerja baru dengan dibukanya perkebunan sawit di daerah tersebut.

"Kelapa sawit memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak menutup kemungkinan jika daerah seperti Kabupaten Serang dan perbatasan Kabupaten Tangerang juga dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit. Jika sudah dibuka lahan perkebunan sawit, tentu akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru," kata Marinus dalam keterangannya kepada **Parlementaria**, di Tangerang, Banten, Jumat (22/9).

Dukungan pembukaan lahan sawit telah disosialisasikan kepada masyarakat di Desa Carenang, Cisoka, Kabupaten Tangerang pada Jumat (22/9) bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan tak hanya kedua daerah tersebut, secara geologis beberapa wilayah di Banten, seperti Lebak dan Pandeglang, juga terdapat beberapa lahan perkebunan sawit.

Menurutnya, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia yang telah banyak memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Legislator Dapil Banten III itu menambahkan bahwa sektor kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang perlu diperhatikan dengan serius sebagai upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045 yaitu membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.

"Karena Indonesia adalah negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dan pengeksport kelapa sawit terbesar di dunia, hingga menjelajah berbagai belahan dunia seperti benua Eropa, Amerika, dan Asia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Senior Bidang Kemitraan BPDPKS Muhamad Rahmat menyatakan kelapa sawit disebut sebagai komoditas andalan yang tidak dapat tergantikan dalam perekonomian nasional. Industri kelapa sawit, lanjutnya, telah memberikan

kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kelapa sawit juga telah mendorong pertumbuhan industri dengan memproduksi lebih dari 146 jenis produk hilir.

Selain itu BPDPKS juga turut memberikan pendampingan kepada para petani sawit yang telah beroperasi di atas lima tahun. Muhamad Rahmat berharap sosialisasi yang dilakukan, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kelapa sawit, produk turunannya, serta kebijakan sawit nasional. **uc/rdn**



Anggota Komisi XI DPR RI
Marinus Gea.

FOTO: MCN/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Legislator Dorong BPS Akuisi Data Sektoral dalam Revisi UU Statistik

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri mengusulkan penguatan kewenangan Badan Pusat Statistik dalam revisi Undang-Undang (UU) Statistik yang saat ini masih dalam tahapan penyusunan di Baleg DPR. Menurutnya, penguatan tersebut dibutuhkan agar ke depannya tidak ditemukan lagi polemik terkait perbedaan data.

Hal itu disampaikan Abidin dalam Pleno Baleg DPR RI dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9). "Revisi UU ini untuk memberikan kewenangan lebih kepada Badan Pusat Statistik untuk mempunyai kewenangan yang bisa mengakuisisi data-data sektoral yang ada," ungkap Abidin.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan, ketepatan suatu kebijakan strategis ditentukan oleh data yang akurat. Karena itu, seharusnya BPS menjadi satu-satunya badan yang menjadi pusat rujukan seluruh data secara nasional.

"Misalnya kalau ada Menteri mengatakan suatu pulau atau desa itu tidak ada. Berarti statistik yang bertanggung jawab karena BPS tidak mendata. Di Pulau Rempang ada kampung ada desa, sehingga kebijakan pemerintah jadi salah. Misalnya, nah hal yang begini tidak boleh terjadi," terangnya.

Lebih lanjut, Abidin Fikri juga mengingatkan polemik keberadaan desa fiktif terkait realisasi penyaluran dana desa. Diketahui, banyak desa tak berpenduduk yang sengaja dibentuk demi mendapatkan kucuran dana desa. Dengan adanya, penguatan BPS kasus serupa tak terulang di kemudian hari.

Ia juga mengusulkan, agar dimasukkan norma yang mengatur sanksi terhadap penyedia data jika terbukti memberikan data yang tak akurat. Menurutnya, hal ini diperlukan dalam rangka mendukung pemerintah membuat kebijakan yang tepat.

"Kedepan kewenangan BPS ini harus benar-benar bertanggung jawab terhadap data yang dirilis, jadi kalau ada kebijakan yang salah itu BPS yang tanggung jawab. Jadi, BPS tidak hanya penyedia data saja. Sebab data itu yang akan digunakan pemerintah. Nah, norma ini juga dimasukkan itu yang penting, sehingga penyedia data juga bertanggung jawab," pungkasnya.

ann/aha

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri.



FOTO: MGN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Catatan Panja Belanja Non K-L 2024: Alokasi Sebesar Rp1.376 Miliar untuk Beberapa Program



FOTO: JKV/PDT

Anggota Panja Banggar DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam foto bersama usai Rapat Kerja Badan Anggaran RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/9/2023).

Anggota Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI Andi Akmal Pasluddin menjelaskan bahwa dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat dalam APBN 2024 dialokasikan sebesar Rp1.376.696,4 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp16.777,9 miliar dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2024 sebesar Rp1.359.918,6 miliar.

Adapun besaran belanja non K/L ini akan digunakan untuk mendukung program pengelolaan utang, program pengelolaan subsidi energi maupun subsidi non energi, program pengelolaan belanja hibah, program pengelolaan belanja lainnya yang termasuk antisipasi kegiatan tanggap darurat dan pengelolaan bencana serta antisipasi risiko fiskal

pada pelaksanaan APBN, program pengelolaan transaksi khusus yang salah satunya adalah kenaikan manfaat pensiun bagi ASN pusat dan TNI/Polri.

Terakhir, anggaran belanja non K/L juga akan diarahkan untuk pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan. Adapun anggaran pendidikan dalam APBN 2024 sebesar Rp665.023,9 miliar atau 20,0 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.325.119,3 miliar yang terdiri atas (1) Belanja pemerintah pusat sebesar Rp241.456,2 miliar, (2) Transfer ke Daerah sebesar Rp346.558,7 miliar, (3) Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp77.000 miliar antara lain terdiri dari Dana Abadi Pendidikan," rinci Andi Akmal dalam Rapat Kerja Badan Anggaran RI bersama pemerintah di Gedung

Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/9).

Untuk anggaran kesehatan dalam APBN 2024, Panja menyetujui alokasi sebesar Rp187.459,5 miliar atau 5,6 persen dari total belanja negara. Anggaran kesehatan ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp121.380,9 miliar dan Transfer ke Daerah sebesar Rp66.078,6 miliar.

Menutup laporannya, legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini menyampaikan harapannya agar laporan tersebut dapat diterima dan disahkan menjadi kesimpulan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran dengan pemerintah dan bank indonesia dalam rangka pembicaraan tingkat I atau pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya.

[uc/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Fadli Zon: Dibutuhkan Terobosan Baru dalam Keorganisasian Majelis Parlemen Asia

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, bertemu dengan Ketua Parlemen Azerbaijan Milli Majlis Sahiba Gafarova. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan kunjungan Delegasi DPR RI ke Azerbaijan untuk menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya Majelis Parlemen Asia (*Asian Parliamentary Assembly/ APA*). Dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerjasama antara parlemen-parlemen Asia.

Kedua belah pihak saling mengapresiasi setinggi-tingginya terkait hubungan baik Azerbaijan dan Indonesia sampai saat ini. Tercatat, Azerbaijan dan Indonesia yang tahun lalu merayakan 30 tahun terjalinnya hubungan diplomatik, dan telah bekerja sama erat di sejumlah organisasi parlemen internasional, antara lain IPU, NAM-PN (Non Blok), PIUC dan Azerbaijan sendiri adalah negara pengamat dalam AIPA.

"Pada saat yang sama, Sahiba Gafarova menyebutkan sangat bangga dengan penerimaan Milli Majlis Azerbaijan sebagai anggota pengamat Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA) dan menekankan pentingnya organisasi kawasan tersebut," ungkap Fadli di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, dalam organisasi Jaringan



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat kunjungan menghadiri Asian Parliamentary Assembly/ APA di Azerbaijan.

Parlemen Gerakan Non-Blok, delegasi parlemen Indonesia ikut serta dalam Konferensi NAM-PN di Baku pada tahun 2022. Pada tahun itu Ketua Milli Majlis, Sahiba Gafarova, juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Pada kunjungan terakhirnya ke Indonesia, pertemuannya dengan Ketua DPR Puan Maharani, serta prospek pengembangan hubungan antar parlemen kedua negara," ujar Fadli.

Fadli Zon, selaku Ketua Delegasi DPR RI, tak lupa juga menyampaikan terima kasih atas keramahmatan yang diberikan kepada delegasi

dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara APA secara tingkat tinggi. Dia mencatat bahwa Indonesia sangat memperhatikan dan mengutamakan pengembangan hubungan dengan Azerbaijan lebih lanjut di banyak bidang.

Bahkan atas nama BKSAP DPR RI, Fadli Zon memberikan dukungan atas pencalonan Azerbaijan dalam keketuaan pada APA untuk periode 2024-2026. Ia berharap akan ada terobosan-terobosan baru dalam organisasi ini terutama dalam penerapan resolusi yang telah diadopsi dan juga monitoring dan evaluasi atas implementasi resolusi tersebut.

ssb/aha



Bangun Kerja Sama, Setjen DPR Terima Masukan Sivitas Akademika UMY dan AIPI Guna Kemajuan Keparlemenan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, membuka Seminar Nasional dengan tajuk 'Fungsi Parlemen Dalam Sistem Demokrasi dan Sistem Politik di Indonesia' bersama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Indra, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa selain bangun kerja sama antara Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dengan AIPI bersama UMY, tujuannya adalah untuk menerima dan merangkul informasi dari mahasiswa-mahasiswa serta masyarakat demi kemajuan keparlemenan di DPR RI.

"Kerja sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan AIPI dan UMY, tujuannya ingin merangkul banyak masukan untuk kegiatan-kegiatan di keparlemenan," kata Indra dalam wawancara kepada **Parlementaria** di UMY, Yogyakarta, hari Jumat (22/9).

Beliau juga menyambut baik animo mahasiswa UMY yang cukup tinggi terhadap kegiatan ini, dan berencana untuk terus mengembangkan kerja sama serupa dengan asosiasi-asosiasi lain yang dapat menjadi uji publik terhadap masukan-masukan untuk kegiatan di DPR RI.

"Tentu ini menjadi yang kami (Setjen DPR RI) harapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan animo mahasiswanya cukup banyak. Kami akan terus kembangkan kerja sama-kerja sama



FOTO: MGN/PDT

Sekjen DPR RI Indra Iskandar foto bersama dengan Ketua AIPI, Rektor UMY, beserta para narasumber pada Seminar Nasional di UMY, Yogyakarta, hari Jumat(22/9/2023).

dengan asosiasi-asosiasi menjadi semacam uji publik terhadap masukan-masukan untuk kegiatan keparlemenan atau DPR RI," ucap Indra.

Indra berharap bahwa Seminar Nasional seperti yang diadakan bersama AIPI dan UMY ini akan membuka perspektif publik dari harapan sampai wawasan, terutama masyarakat dan mahasiswa mengenai DPR RI. "Kami berharap kedepannya. Seminar Nasional seperti ini akan membuka perspektif publik yaitu masyarakat dan mahasiswa. Apa sebenarnya hal-hal yang diharapkan dan apa saja yang belum diketahui terhadap DPR RI," tutupnya.

Dalam kesempatan itu pula, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah, yang menjadi narasumber menyoroti pentingnya Seminar Nasional sebagai kesempatan bagi berbagai pihak, mulai dari politisi, profesor, akademisi, hingga mahasiswa, untuk bersama-sama berpikir tentang kualitas demokrasi di Indonesia. "Ini juga merupakan kesempatan, baik itu kami sebagai politisi bahkan juga akademisi. Kemudian juga mahasiswa atau kampus di ruang yang sama, dengan berpikir yang sama untuk kualitas demokrasi kita jauh lebih baik lagi," ungkapnya.

mun/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya





KETUA DPR DR. (H.C) PUAN MAHARANI MENERIMA KUNJUNGAN PARA KETUA OSIS YANG TERGABUNG DALAM INDONESIA STUDENT LEADERSHIP CAMP (ISLC) UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2023 DI GEDUNG NUSANTARA, SENAYAN, JAKARTA, SENIN (25/9/2023). FOTO: RSB/PDT



KETUA KOMISI I DPR RI MEUTYA VIADA HAFID (KANAN) SAAT BERTUKAR CENDERAMATA USAI MENERIMA KUNJUNGAN DELEGASI PARLEMEN JEPANG DI GEDUNG NUSANTARA III, SENAYAN, JAKARTA, SELASA (19/09/2023). FOTO: RSB/PDT



WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI ANGGIA ERMA RINI SAAT MEMIMPIN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI KE BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON SERANG, BANTEN, JUMAT (15/9/2023). FOTO: MRI/PDT

